



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

PENGUMUMAN

NOMOR : 20 -1/SEK/KU.01/1/2016

TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.a) DAN PRATAMA (ESELON II.a) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2016, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah :

No	Jabatan	Eselon
1.	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	I.a
2.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Dirjen. Badilmiltun)	I.a
3.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dirbinganis Badilum)	II.a
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (Sekretaris Ditjen Badilmiltun)	II.a
5.	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	II.a
6.	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	II.a
7.	Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	II.a
8.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	II.a

B. Persyaratan Administrasi

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) bagi calon pejabat eselon I dan berpangkat Pembina Tk.I (IV/b) bagi calon pejabat eselon II;

3. Berusia per 1 April 2016 minimal 50 tahun dan maksimal 57 tahun untuk Jabatan Eselon I.a; dan berusia per 1 April 2016 minimal 45 tahun dan maksimal 55 tahun untuk Jabatan Eselon II.a.
4. Kualifikasi pendidikan minimal S.1 sesuai dengan kompetensi dan kapasitas jabatan yang dilamar;
5. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
6. Telah melaporkan LHKPN/LHKASN tahun terakhir;
7. Tanda terima penyerahan SPT satu tahun terakhir;
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang, dan berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
9. Sehat jasmani dan rohani.

C. Persyaratan Khusus

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI:
 - 1) Berkedudukan sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial;
 - 3) Memiliki konsepsi perencanaan program di bidang pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung dan mampu mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut di lingkungan Mahkamah Agung;
 - 4) Mampu mengorganisir pelaksanaan program dan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung;
 - 5) Mampu melaksanakan evaluasi program pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung;
 - 6) Memiliki pengetahuan dan kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);
 - 7) Mampu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN):
 - 1) Berkedudukan sebagai pejabat struktural eselon I atau eselon II atau menduduki/pekerja menduduki pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas IA;
 - 2) Minimal 2 tahun memegang jabatan struktural eselon I atau eselon II atau menduduki/pekerja menduduki pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas IA;
 - 3) Memiliki konsep perencanaan program di bidang tenaga teknis dan administrasi peradilan militer dan TUN;
 - 4) Memiliki pengetahuan teknis yustisial peradilan Militer dan TUN;
 - 5) Mampu mengorganisir pelaksanaan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
 - 6) Mampu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;

- 7) Memiliki kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum:
 - 1) Berkedudukan sebagai pejabat struktural eselon II atau eselon III atau menduduki/penah menduduki pimpinan pengadilan kelas IA;
 - 2) Minimal 2 tahun memegang jabatan struktural eselon II atau eselon III atau menduduki/penah menduduki pimpinan pengadilan kelas IA;
 - 3) Memahami teknis dan administrasi yustisial peradilan umum;
 - 4) Mampu menyusun perencanaan pembinaan program teknis SDM bidang teknis peradilan umum;
 - 5) Mampu mengimplementasikan program SDM bidang teknis peradilan umum;
 - 6) Mampu mengevaluasi program SDM bidang teknis peradilan umum;
 - 7) Mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan umum;
 - 8) Memiliki kemampuan dalam pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
 - 9) Mampu mengoperasikan komputer.
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Sekretaris Ditjen Badilmiltun):
 - 1) Menduduki jabatan sebagai pejabat struktural eselon II atau eselon III;
 - 2) Minimal 2 tahun memegang jabatan struktural eselon II atau eselon III;
 - 3) Memahami teknis dan administrasi yustisial;
 - 4) Mampu menyusun konsep perencanaan program dan anggaran Ditjen Badilmiltun;
 - 5) Mampu melaksanakan/mengimplementasikan program dan anggaran Ditjen Badilmiltun;
 - 6) Mampu mengevaluasi program dan anggaran Ditjen Badilmiltun;
 - 7) Mampu merumuskan dan melaksanakan standar, norma, kriteria dan prosedur, pembinaan administrasi Ditjen Badilmiltun;
 - 8) Memiliki kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);
 - 9) Mampu mengoperasikan computer.
 5. Untuk pengisian Jabatan Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, peserta harus memenuhi kompetensi teknis sebagai berikut:
 - 1) Menduduki jabatan sebagai Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung minimal 1 tahun;
 - 2) Memahami teknis dan administrasi yustisial;
 - 3) Memiliki kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);

- 4) Mampu mengoperasikan komputer.
6. Untuk pengisian Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, peserta harus memenuhi kompetensi teknis sebagai berikut:
 - 1) Menduduki jabatan struktural eselon II atau eselon III;
 - 2) Minimal 2 tahun memegang jabatan struktural eselon II atau eselon III;
 - 3) Memiliki konsepsi dan mampu menyusun kebijakan rencana program, rencana anggaran, dan akuntabilitas reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 4) Memahami organisasi dan tata laksana kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 5) Memiliki kemampuan mengevaluasi program kerja anggaran dan penilaian kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 6) Memiliki kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);
 - 7) Menguasai proses pengadaan barang dan jasa;
 - 8) Mampu mengoperasikan komputer.

II. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan mulai **tanggal 25 Januari s.d. 5 Februari 2016**
2. Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi dengan dilengkapi:
 - a. *Printout* Registrasi Pendaftaran Online;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (terlampir);
 - c. Foto Copy SK Pangkat dan Jabatan terakhir;
 - d. Foto Copy KTP;
 - e. Foto Copy Ijazah terakhir;
 - f. Foto Copy SKP dua tahun terakhir;
 - g. Foto Copy Tanda Terima LHKASN/LHKPN;
 - h. Foto Copy Sertifikasi keahlian yang dimiliki (jika ada);
 - i. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dibubuhi materai Rp.6000,- dan diketahui oleh atasan langsung disertai stempel dinas.
3. Seluruh dokumen persyaratan administrasi harus disampaikan dalam amplop tertutup mulai tanggal 25 Januari s/d 5 Februari 2016 (cap pos) dan ditujukan kepada

**PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA (ESELON I.a) DAN PRATAMA (ESELON II.a)
PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016**

**d/a. BIRO KEPEGAWAIAN BADAN URUSAN ADMINITRASI,
MAHKAMAH AGUNG RI
GEDUNG G LT. 3 JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA PUSAT
KODE POS 10110**

III. Tahapan Seleksi/Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)	Keterangan
1.	Pengumuman	20 Januari – 1 Februari 2016	Diumumkan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI
2.	Pendaftaran secara Online dan Penerimaan Berkas Administrasi	25 Januari – 5 Februari 2016	
3.	Seleksi Administrasi	5 – 12 Februari 2016	
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	15 Februari 2016	
5.	Penelusuran Rekam Jejak	16 – 25 Februari 2016	
6.	Penulisan Makalah	29 Februari – 8 Maret 2016	
7.	Seleksi Kompetensi (Presentasi dan Wawancara)	1 – 8 Maret 2016	
8.	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi	14 Maret 2016	
9.	<i>Assessment</i>	28 – 31 Maret 2016	
10.	Pengumuman	18 April 2016	

*) Jadwal Tentatif

IV. Ketentuan lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Pelamar hanya dapat melamar untuk 1 (satu) jabatan yang lowong.
3. Pendaftaran dilakukan melalui *website* resmi Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.**
5. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi <https://www.mahkamahagung.go.id>.
6. Keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) dan Pratama (Eselon II.a) pada Mahkamah Agung bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2016

Ketua Panitia Seleksi



Nurhadi